

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Ali, R. H. Zaimuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2021.
- Bentham, Jeremy, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Clarendon Press, Oxford, 1789.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publications, California, 2011.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Pendekatan Interdisipliner*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Harsono, C.I., *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Kelsen, Hans., *Pure Theory of Law*, University of California Press, Berkeley, 1967.
- Khayatul, *Kompilasi Teori dan Penerapan Remisi*, GUEpedia, Yogyakarta, 2021.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2020.
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- , *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, cetakan 4, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Perlindungan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2019.
- , Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2021.
- , *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)*, Alfabeta, Bandung, 2021.

Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2007.

Zehr, Howard, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York, 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999).

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keputusan Nomor PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2014 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/P/HUM/2021 tentang Pencabutan Syarat Pengetatan Remisi Bagi Narapidana Korupsi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 317).

*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)* A/RES/70/175, Resolusi diadopsi 17 Desember 2015.

### **Tesis**

Hariyati, M., Implementasi Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lapas Kelas I Semarang, *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Widyadarma, B. G., Efektivitas Pemberian Remisi Online dalam Perspektif Pembinaan Napi di Lapas Kelas IIA Purwokerto, *Tesis*, Universitas Jenderal Soedirman, 2021.

### **Jurnal Ilmiah**

Aldianto, M. Y., dan R. R. Phahlevy, Hak Remisi bagi Narapidana Pasca Amandemen Konstitusi, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 1 No. 3, 2021.

Hasibuan, B. S., Amrizal, dan S. Thani, Penerapan Hukuman Disiplin terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak

- Pidana Penganiayaan di dalam Lapas Kelas IIA Lhokseumawe, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. VII No. 3, 2024.
- Haryono, Implikasi Perubahan Undang-Undang Pemasarakatan terhadap Perlakuan Tahanan, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15 No. 1, 2021.
- Maesty, A. D. P., Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Bureaucracy Journal*, Vol. 2 No. 3, 2022.
- Pratiha, Faktor Penghambat dalam Pemberian Remisi terhadap Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Tabanan), *Jurnal Politeknik dan Ilmu Pemasarakatan*, Vol. 8 No. 4, 2021.
- Sugiarto, K., Wicaksono, K. B., Sumiati, Dewi, S. P., Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Ngawi, *Yustisia Merdeka*, Vol. 7 Nomor 1, 2021.
- Sulistiyatna, M. G. A., Hak Remisi dan Asimilasi Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Lex Renaissance*, Vol. 6 No. 1, 2021.

#### **Website**

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 2 April 2025.
- Kementerian Hukum dan HAM RI, Profil Direktorat Jenderal Pemasarakatan, <https://www.ditjenpas.go.id/profil>, diakses pada 2 April 2025.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), <https://www.komnasham.go.id>, diakses pada 2 April 2025.
- Ombudsman Republik Indonesia, <https://ombudsman.go.id>, diakses pada 2 April 2025.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), <https://www.ylbhi.or.id>, diakses pada 2 April 2025.